# DAFTAR PUSTAKA

## Buku


Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Rajawali Pers. Depok. 2020.

Cahyono, Eko et al. *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta. 2016.

Direktur Jenderal Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang. *Petunjuk Teknis Identifikasi dan Penelitian Hak Atas Tanah yang Telah Berakhir Jangka Waktu*. Jakarta. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2022.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. Depok. 2018.

Fadli, Fendi Setyawan, et al. *Politik Hukum Agraria Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI*. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jakarta. 2014.

Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo. *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Kafilah Pubishing. Solo. 2018.

Hajati, S.dan Agus Sukarmadji. *Buku ajar Politik Hukum Pertanahan.* Airlangga University Press. Jakarta. 2011.

Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Properti*. PPHBI. Jakarta. 2016.

Irawan, Candra. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung, CV. Mandar Maju. 2017.

Isnaini dan Anggreni A. Lubis. *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif.* Medan, CV. Pustaka Prima. 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008.

Muwahid. *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*. UIN Sunan Ampel Press. Surabaya. 2016.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV Mandar Maju. Bandung. 2016.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *POLITIK HUKUM AGRARIA: Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI.* Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI. 2014.

Suhadi, Manan. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.* Jember. Media Cetak Aksara. 2020.

Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan.* Jakarta. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia. 2012.

Yazid, Fadhil. *Pengantar Hukum Agraria.* Medan. Undhar Press. 2020.

**Jurnal**

Abby, Fat'hul Achmadi. "Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan". *Jurnal Al'Adl,* Volume VIII Nomor 3. 2016.

Fitria. "Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari". *Jurnal Sains Sosio Huaniora,* Volume 3 Nomor 1. 2019.

Krismanika, N.K., I Putu Gede Seputra, Luh Putu Suryani. "Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia". *Jurnal Interpretasi Hukum.* Vol. 1 No. 1. 2020,

Nainggolan, Netty Herawati. "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha Dengan Kelompok Tani Sekar Rukun Di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara". *Jurnal Mercatoria,* Vol. 9 No. 1. 2016.

Setiawan, Pujha J dan Isran Idris. "Penyelesaian Sengketa Tanah Kavling Perumahan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai". *Journal of Civil and Bussiness Law,* Volume 2 Nomor 2. 2021.

Wati, Lila Silvia, Diyan Isnaeni, dan Moh.Muhibbin. "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XII Yang Dikuasai Masyarakat (Studi Kasus : Desa Tegalrejo, Pancursari, Kabupaten Malang)". *Jurnal Dinamika* Volume 27, Nomor 9. 2021.

Wulansari, Ditya Putri dan Pahlefi. "Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi". *Journal of Civil and Bussiness Law,* Volume 1 Nomor 3. 2020.

**Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tatacara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.